

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 9 dan 11

Anggaran TPP PLKB Mengendap

Pemkab Belum Salurkan Dana Rp 666 Juta

KUDUS - Pemkab Kudus hingga kini masih menyisakan hutang kepada 37 orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada Dinsos P3AP2KB Kudus. Nominal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan yakni Rp 666 juta, terungkap usai dilakukan pertemuan antara Pemkab setempat dengan Ombudsman Jateng belum lama ini. Kepala Ombudsman Jateng Acim Dartasim mengatakan,

PIUTANG TPP PLKB KUDUS

- ♦ Jumlah pegawai 37 orang
- ♦ mendapat uang Rp 18 juta
- ♦ total dana mengendap Rp 666 juta

► Baca ANGGARAN HAL... 11

tertundanya pembayaran TPP bagi 37 penyuluh KB tersebut,

akibat imbas dari ditariknya pegawai daerah ke pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi sejak Januari 2018.

Namun selama setahun kemarin, kata Acim, seharusnya

masih menjadi tanggungan Pemkab Kudus. "Katanya sudah dianggarkan, tinggal konsultasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pencairannya," kata Acim.

Selain penarikan pegawai ke Pemerintah Pusat, imbuhan Acim, tertundanya pembayaran TPP akibat masih ada ketimpangan regulasi. Sehingga terjadi kekhawatiran jika dicairkan pada tahun 2017.

Dalam waktu dekat, pihak Ombudsman Jateng segera memfasilitasi Pemkab Kudus untuk bertemu dengan BPK. Alasannya, karena semua pengeluaran anggaran, harus ada pemeriksaan dari BPK.

Untuk tahap selanjutnya, yakni menunggu disahkannya draf Peraturan Bupati (Perbup) oleh Gubernur Jateng, terkait pencairan TPP bagi 37 orang penyuluh KB.

"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil BPK untuk melakukan klarifikasi mandat (Perbup, red) TPP akan diputuskan hari itu (saat pertemuan, red) juga," tambahnya.

Acim menjelaskan, total

pendapatan TPP yang seharusnya diterima untuk 37 orang PLKB Kudus, masing-masing mendapat uang Rp 18 juta, yakni dari per hitungan Rp 1,5 juta dikalikan 12 bulan.

"Jadi total yang harus dibayarkan Pemkab Kudus sebanyak Rp 666 juta. Maksimal 2 bulan kedepan, Pemkab Kudus harus sudah membayarkannya," pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus

Ludful Hakim, mengaku sudah menganggarkan untuk pembayaran TPP PLKB. Namun 37 orang penyuluh tersebut, belum masuk aplikasi kinerja. Sehingga perlu Perbup sebagai dasar pembayaran TPP mereka.

"Sudah dianggarkan dan kami sudah siapkan Perbup sebagai dasar pencairan. Karena 37 orang itu belum masuk aplikasi kinerja, dan kami sudah konsultasi dengan berbagai pihak," tandasnya. (han/rif)